



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDRI YOGAMA**
2. Jabatan : **KEPALA PERWAKILAN**
3. NHK : **144870**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 698.850.909**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 720 m²/171 m² di KAB / KOTA TRENGGALEK, HIBAH TANPA AKTA Rp. 151.522.712
2. Tanah Seluas 247 m² di KAB / KOTA TRENGGALEK, HASIL SENDIRI Rp. 22.953.216
3. Tanah Seluas 207 m² di KAB / KOTA TRENGGALEK, HASIL SENDIRI Rp. 19.236.096
4. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m²/84 m² di KAB / KOTA TRENGGALEK, HIBAH TANPA AKTA Rp. 205.167.400
5. Tanah Seluas 2025 m² di KAB / KOTA TRENGGALEK, WARISAN Rp. 97.029.900
6. Tanah dan Bangunan Seluas 274 m²/72 m² di KAB / KOTA TRENGGALEK, WARISAN Rp. 202.941.585

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 444.502.467**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA G/MT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 72.900.000
2. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 1972, HASIL SENDIRI Rp. 2.551.500
3. MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.374.000
4. MOTOR, YAMAHA SCORPIO Z Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.112.500



5. MOTOR, YAMAHA LEXI Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.122.000
6. MOBIL, DAIHATSU TAFT HUNTER Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 42.282.000
7. MOBIL, HONDA CITY HATCHBACK Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 258.040.467
8. MOTOR, VESPA P150XE Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 8.550.000
9. MOTOR, HONDA ADV 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 33.570.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	68.964.854
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.042.193.591
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.254.511.821
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.254.511.821

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.